

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas peran diplomasi lingkungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mendukung transisi energi pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2019–2024 melalui kerja sama bilateral dengan Tiongkok. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas krisis iklim global, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, khususnya batu bara dan bahan bakar minyak. Dalam situasi tersebut, transisi energi menjadi agenda strategis nasional sekaligus komitmen internasional Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian Paris dan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (e-NDC). Penelitian ini kemudian menempatkan diplomasi lingkungan sebagai instrumen politik luar negeri yang digunakan Indonesia untuk menjembatani kebutuhan pembangunan domestik dengan tuntutan global, khususnya melalui kerja sama dengan Tiongkok sebagai mitra strategis di bidang teknologi dan investasi energi bersih.

Berdasarkan hasil analisis Penulis, dapat disimpulkan bahwa diplomasi lingkungan Indonesia telah berkontribusi dalam mendukung transisi energi, namun belum sepenuhnya mencapai tahap optimal dan masih berada dalam proses. Diplomasi lingkungan Indonesia dengan Tiongkok diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama konkret, seperti pengembangan energi terbarukan, investasi energi bersih, pembangunan infrastruktur kelistrikan, pengembangan kendaraan listrik, serta transfer teknologi hijau. Kerja sama ini menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan tidak hanya berfungsi secara normatif sebagai bentuk komitmen terhadap isu perubahan iklim, tetapi juga berperan secara strategis dalam membuka akses pendanaan, teknologi, dan investasi yang dibutuhkan Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Namun demikian, efektivitas diplomasi lingkungan tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional,

ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara, serta tantangan struktural dalam implementasi kebijakan transisi energi. Kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan Indonesia belum sepenuhnya mampu mengubah struktur energi nasional secara menyeluruh, melainkan masih berfungsi sebagai penggerak awal dan pendukung proses transisi energi yang bersifat bertahap.

Selain melalui kerja sama bilateral dengan Tiongkok, diplomasi lingkungan Indonesia juga dijalankan melalui berbagai forum dan mekanisme multilateral, baik di tingkat regional maupun global, seperti dalam forum BRIGC. Keterlibatan Indonesia dalam BRIGC terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan dijalankan melalui pendekatan yang bersifat komplementer antara jalur bilateral dan multilateral. Pendekatan ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar, menyelaraskan kepentingan nasional dengan norma global, serta mengakses dukungan internasional dalam bentuk pendanaan iklim, kerja sama teknologi, dan penguatan kapasitas institusional. Dengan demikian, diplomasi lingkungan Indonesia tidak dapat dipahami secara eksklusif dalam kerangka bilateral semata, melainkan sebagai strategi yang dijalankan secara berlapis dan saling melengkapi.

Ke depan, efektivitas diplomasi lingkungan Indonesia, baik melalui jalur bilateral dengan Tiongkok maupun multilateral melalui BRIGC, dalam mendukung transisi energi sangat bergantung pada konsistensi dan keberanian kebijakan domestik dalam melakukan reformasi energi yang lebih mendasar. Penguatan regulasi nasional, percepatan pengurangan ketergantungan terhadap batu bara, serta peningkatan pemanfaatan energi terbarukan secara lebih ambisius menjadi prasyarat utama agar hasil diplomasi lingkungan dapat memberikan dampak yang lebih substansial. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat dan kebijakan domestik yang selaras, diplomasi lingkungan berpotensi berhenti pada tataran simbolik sebagai representasi komitmen internasional, tanpa diikuti oleh perubahan nyata dalam sistem energi nasional. Oleh karena itu, diplomasi lingkungan perlu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen hubungan luar negeri, tetapi juga sebagai pengungkit strategis dalam mendorong transformasi kebijakan energi nasional. Integrasi yang lebih kuat antara agenda diplomasi, kebijakan

energi domestik, dan strategi pembangunan berkelanjutan menjadi kunci agar proses transisi energi Indonesia dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat konsistensi kebijakan domestik dalam mendukung transisi energi agar diplomasi lingkungan yang dijalankan tidak berhenti pada tataran komitmen dan kerja sama simbolik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama internasional, termasuk dengan Tiongkok, diiringi dengan pengurangan bertahap ketergantungan pada energi fosil, khususnya batu bara, melalui reformasi bauran energi nasional, percepatan pengembangan energi terbarukan, serta penyelarasan regulasi lintas sektor. Dengan demikian, diplomasi lingkungan dapat berfungsi sebagai pengungkit transformasi energi yang nyata dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan kerja sama dengan Tiongkok tidak hanya sebagai hubungan perdagangan dan investasi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat skema alih teknologi, pengembangan industri kendaraan listrik dan energi terbarukan dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang energi hijau. Pendekatan ini penting agar Indonesia tidak terjebak pada ketergantungan teknologi impor, melainkan mampu membangun kemandirian energi jangka panjang yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan membandingkan diplomasi lingkungan Indonesia dengan negara mitra lainnya atau menganalisis secara lebih mendalam keterlibatan aktor non-negara, seperti sektor swasta dan organisasi internasional, dalam mendukung transisi energi. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak jangka panjang kerja sama Indonesia–Tiongkok terhadap penurunan emisi karbon dan ketahanan energi nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya

kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami peran diplomasi lingkungan sebagai instrumen strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.